

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Hadijah, (2024) tentang “**Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong**” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, dengan menggunakan teori Implementasi Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik Pengumpulan data, Kondensasi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dikategorikan terimplementasi.
2. Ery Koeswari, (2023) tentang “**Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong**” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dengan menggunakan teori implementasi Edward III indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-kualitatif, Teknik pengumpulan data diambil melalui penarikan sampel secara persuasive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sudah dikategorikan terimplementasi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan berupa sarana dan prasarana yang masih kurang, sosialisasi yang tidak dilakukan berkala, serta anggaran pengadaan sarana prasarana yang masih minim.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Pengertian Kebijakan**

Menurut Parsons (Dalam Dewi, 2016:15) Secara ringkas, kebijakan dipahami sebagai seperangkat ketentuan tertulis serta keputusan formal yang ditetapkan oleh suatu organisasi guna mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia, baik dalam ranah publik maupun pribadi. Esensi utama dari kebijakan ialah menggabungkan berbagai bentuk pengetahuan ke dalam satu kesatuan disiplin yang komprehensif untuk menelaah alternatif pilihan publik dan proses pengambilan keputusan, sehingga berkontribusi terhadap terwujudnya proses demokratis dalam masyarakat.

Menurut *Oxford Learner's Pocket Dictionary* (Dalam Dewi, 2016:15), istilah kebijakan diartikan sebagai rancangan atau susunan tindakan yang telah ditetapkan maupun dipilih oleh suatu organisasi, baik itu partai politik, perusahaan, maupun lembaga lainnya. Selain itu,

dalam pengertian lain, kebijakan juga dapat dimaknai sebagai dokumen tertulis yang berfungsi sebagai perjanjian atau kontrak dalam bidang asuransi.

Secara luas, istilah “kebijakan” atau *policy* merujuk pada tindakan maupun perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu, seperti pejabat, organisasi, ataupun lembaga pemerintahan, dalam konteks suatu bidang kegiatan tertentu. Dengan kata lain, kebijakan menggambarkan pola tindakan yang terencana dan memiliki tujuan yang jelas dalam menjalankan fungsi atau tanggung jawab tertentu.

Sementara itu, menurut Charles O. Jones, (Dalam Dewi, 2016:15) istilah kebijakan (*policy term*) kerap digunakan dalam percakapan dan praktik sehari-hari untuk menggambarkan beragam bentuk aktivitas atau keputusan yang sesungguhnya memiliki perbedaan mendasar. Istilah ini sering kali dipertukarkan dengan berbagai konsep lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standar, usulan (*proposal*), maupun rancangan besar (*grand design*).

## **2. Kebijakan Publik**

Menurut Leo Agustino, (2022:17) Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu dan bukan muncul secara kebetulan. Setiap kebijakan memiliki arah dan sasaran yang jelas karena disusun oleh pihak berwenang yang memiliki legitimasi dalam pelaksanaannya. Kebijakan publik bersifat terpadu dan simultan, bukan keputusan yang terpisah,

serta menekankan pada tindakan nyata pemerintah terhadap persoalan publik, bukan sekadar rencana atau pernyataan niat. Dalam pelaksanaannya, kebijakan dapat bersifat populer seperti pemberian bantuan sosial, atau tidak populer seperti penghapusan subsidi dan pengetatan ekonomi. Kebijakan juga bisa berbentuk positif ketika pemerintah bertindak untuk menyelesaikan masalah, maupun negatif ketika secara sadar memilih untuk tidak bertindak. Seluruh kebijakan publik berlandaskan pada hukum yang memberikan legitimasi serta bersifat mengikat dan memerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Chandler dan Plano (Dalam Pasolong, 2022:46-47) dalam Kamus Administrasi Publik, kebijakan publik dapat dipahami sebagai upaya strategis dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pemerintah guna mengatasi berbagai persoalan yang muncul di ranah publik. Lebih jauh, keduanya menilai bahwa kebijakan publik merupakan bentuk investasi berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung kelompok masyarakat yang kurang berdaya, sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya sekaligus berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan.

Menurut Thomas R. Dye (Dalam Pasolong, 2022:47), kebijakan publik diartikan sebagai segala bentuk keputusan yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk tindakan maupun ketidaktindakan. Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang dipilih pemerintah untuk dilaksanakan harus memiliki tujuan yang jelas, karena kebijakan publik

mencakup seluruh aktivitas pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak sekadar berupa pernyataan kehendak atau niat dari pemerintah maupun pejabatnya, melainkan merupakan tindakan nyata yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu.

Berdasarkan tiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang secara sadar dan strategis oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam mengatasi persoalan masyarakat. Kebijakan ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan melalui proses yang terencana, memiliki legitimasi hukum, serta dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Dalam implementasinya, kebijakan publik dapat berupa tindakan langsung maupun keputusan untuk tidak bertindak, tergantung pada konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, kebijakan publik juga berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam mengelola sumber daya negara secara efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat partisipasi publik dalam proses pemerintahan.

### **3. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik**

Proses perumusan kebijakan publik pada dasarnya mencakup beberapa tahapan yang saling berkaitan. Meskipun secara teoritis tahapan tersebut tampak berjalan secara linear, dalam praktiknya proses tersebut sering kali berlangsung secara tidak berurutan dan bersifat berulang. Para pakar kebijakan publik memiliki pandangan yang beragam dalam menamai maupun mengelompokkan setiap tahap

tersebut. Menurut Muchlis Hamdani (Dalam Dewi, 2016:26), proses penyusunan kebijakan publik dapat dibagi ke dalam enam tahapan utama.

a. Pendefinisian masalah (*problem definition*)

Tahap ini berfokus pada proses mengenali serta merumuskan berbagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Isu-isu tersebut pada dasarnya merupakan fenomena yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Suatu kondisi baru dianggap sebagai masalah ketika masyarakat mulai menyadari adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan melalui intervensi atau tindakan pemerintah. Kesadaran serta kebutuhan tersebut bisa muncul karena berbagai faktor, seperti adanya indikator tertentu yang menunjukkan masalah kebijakan, terjadinya peristiwa signifikan, ataupun hasil umpan balik dari suatu program. Pada tahap ini, keterlibatan banyak pihak sangat mungkin terjadi, baik dari kalangan individu, kelompok, maupun lembaga.

b. Tahapan penentuan agenda (*agenda setting*)

Tahapan ini berhubungan dengan proses menetapkan masalah-masalah yang dianggap paling penting atau mendesak untuk ditangani. Penentuan agenda memiliki peran yang krusial karena berhubungan langsung dengan dinamika politik serta proses perumusan suatu masalah. Cara suatu isu dirumuskan pada tahap ini akan sangat memengaruhi berbagai alternatif solusi yang dapat

dipilih, yang pada akhirnya menentukan arah kebijakan yang akan disusun dan diimplementasikan.

Menurut Cobb dan Elder, terdapat dua jenis *policy agenda*, yaitu:

- 1) *agenda sistemik*, yaitu sekumpulan isu yang secara umum dirasakan dan diperhatikan oleh masyarakat luas, mencakup berbagai persoalan yang muncul dan menarik perhatian publik.
- 2) *agenda institusional*, yaitu kumpulan isu yang layak mendapat perhatian pemerintah karena berada dalam lingkup kewenangan dan tanggung jawab lembaga pemerintahan.

c. Perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*)

Pada tahap ini, peran utama dijalankan oleh apa yang disebut sebagai komunitas kebijakan, yang terdiri atas pejabat pemerintahan, kelompok kepentingan, kalangan akademisi, para profesional, lembaga riset, komunitas intelektual, hingga pengusaha yang bergerak di bidang kebijakan publik. Proses ini memerlukan beragam konsep untuk menggambarkan hubungan yang terbentuk antara para aktor penentu agenda dengan pihak yang merumuskan alternatif kebijakan, seperti konsep *subgovernment*, *iron triangle*, dan *issue network*.

d. Pemilihan alternatif kebijakan (*policy adoption*)

Tahapan ini berfokus pada proses mencapai kesepakatan dalam menentukan alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada, sekaligus memastikan legitimasi terhadap alternatif yang dipilih tersebut. Pada tahap ini, rancangan tindakan kemudian diformalkan

menjadi suatu peraturan yang sah. Beragam pendekatan digunakan untuk menjelaskan mekanisme pemilihan alternatif, seperti teori elit yang menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan hasil kompromi antara nilai serta kepentingan kelompok elit, sementara teori kelompok berpendapat bahwa kebijakan publik lahir dari hasil interaksi dan perjuangan antar kelompok dalam masyarakat.

e. Pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*)

Tahapan ini berhubungan dengan usaha pemerintah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara prinsip, tahap ini mencerminkan bagaimana sistem pemerintahan bekerja dalam menjalankan kebijakan. Karena makna dan karakter implementasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tahap ini memiliki peran yang sangat penting. Pelaksanaan kebijakan pada dasarnya bisa saja merupakan proses sederhana untuk mencapai sasaran tertentu, namun dalam praktiknya justru sering kali menjadi kompleks. Kompleksitas tersebut muncul karena pelaksanaan kebijakan kerap memerlukan penjabaran lebih rinci atas tujuan yang telah dirumuskan oleh para pejabat atau lembaga pelaksana, baik untuk mencegah munculnya konflik maupun untuk memperjelas kebijakan yang sebelumnya masih bersifat umum.

f. Tahap penilaian kebijakan (*policy evaluation*)

Tahap ini merupakan fase yang berfokus pada analisis terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan. Pada tahap ini, perhatian utama diarahkan untuk mengidentifikasi serta menilai

sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi tidak hanya meninjau efektivitas kebijakan dalam menghasilkan dampak yang diharapkan, tetapi juga menelaah berbagai konsekuensi, baik positif maupun negatif, yang muncul sebagai akibat dari implementasinya. Selain itu, evaluasi kebijakan berperan penting dalam memberikan masukan bagi perbaikan di masa mendatang, membantu pengambil keputusan menilai efisiensi penggunaan sumber daya, serta menentukan apakah kebijakan perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau bahkan dihentikan.

#### **4. Pengertian Implementasi**

Menurut Grindle (Dalam Sobirin, 2023:36), implementasi dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan administratif yang bersifat menyeluruh dan dapat dikaji pada tingkat pelaksanaan program tertentu. Tahapan implementasi baru dapat dijalankan ketika tujuan serta target program telah dirumuskan dengan jelas, rencana kegiatan telah disusun secara sistematis, dan alokasi dana telah tersedia serta dialirkan guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Jumroh & Pratama, (2021:1) Implementasi merupakan suatu konsep yang memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya sebatas pada pelaksanaan (*execution*) suatu program atau aktivitas, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang memengaruhi proses tersebut, termasuk hasil serta manfaat yang dihasilkan. Lebih dari itu, implementasi juga berkaitan erat dengan pencapaian sasaran yang lebih

menyeluruh dan strategis sebagai bagian dari tujuan besar organisasi secara keseluruhan. Sebagai contoh, aktivitas pelayanan publik yang dilakukan oleh unit kerja di tingkat daerah pada dasarnya bukan hanya mencerminkan upaya pada skala mikro, melainkan juga berkontribusi terhadap tercapainya tujuan nasional dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut A. Mazmanian dan P. A. Sabatier (Dalam Dewi, 2016:154), implementasi dipahami sebagai proses untuk menelaah apa yang benar-benar terjadi setelah suatu program ditetapkan atau mulai diberlakukan. Fokus utama dari implementasi kebijakan terletak pada rangkaian peristiwa dan aktivitas yang muncul setelah pedoman kebijakan negara disahkan, termasuk upaya dalam mengelola dan menjalankan kebijakan tersebut agar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat serta terhadap berbagai kegiatan atau program yang sedang maupun akan dijalankan.

## **5. Implementasi Kebijakan**

Menurut Jumroh & Pratama, (2021:45) Implementasi kebijakan bukan sekadar tindakan menjalankan keputusan atau mewujudkan keinginan yang telah dituangkan dalam bentuk kebijakan, melainkan merupakan proses terapan yang lebih kompleks. Pelaksanaan suatu kebijakan tidak serta-merta menandakan bahwa kebijakan tersebut telah benar-benar diimplementasikan dengan baik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sangat bergantung pada berbagai tahapan dan faktor yang memengaruhi prosesnya. Setiap faktor tersebut perlu

dianalisis secara mendalam dan terukur agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kebijakan. Penilaian terhadap kinerja kebijakan pun dapat dilakukan melalui berbagai indikator, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, guna memperoleh gambaran yang objektif mengenai efektivitas implementasinya.

Menurut Leo Agustino, (2022:144) Secara umum, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengubah ketentuan atau peraturan menjadi langkah nyata dalam pelaksanaannya. Namun, dalam kenyataannya, proses implementasi tersebut tidaklah sederhana karena melibatkan dinamika yang kompleks, bahkan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang beragam akibat adanya intervensi dari berbagai pihak yang berkepentingan.

## **6. Model-Model Implementasi Kebijakan**

- a. Model Implementasi Kebijakan Menurut Donald van Metter & Carl Van Horn (Dalam Leo Agustino, 2022:150), Pendekatan *top-down* yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn dikenal dengan nama *A Model of The Policy Implementation*. Model ini memandang implementasi kebijakan sebagai suatu bentuk representasi atau gambaran konseptual dari pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan secara terencana dengan tujuan mencapai efektivitas dan kinerja yang optimal. Dalam kerangka pemikiran ini, proses implementasi dianggap berlangsung secara linier, dimulai dari tahap pengambilan keputusan politik, kemudian dilanjutkan oleh aparat pelaksana, hingga akhirnya menghasilkan kinerja kebijakan public

yang diharapkan, dengan seluruh prosesnya saling terkait melalui berbagai variabel yang memengaruhi keberhasilannya.

Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

#### 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan hanya dapat dinilai secara objektif apabila ukuran serta tujuan kebijakan tersebut disusun secara realistis dan selaras dengan kondisi sosial budaya yang berlaku di lingkungan pelaksana. Apabila sasaran atau standar kebijakan dirancang terlalu idealistis, bahkan cenderung utopis, maka proses implementasinya di tingkat masyarakat akan menghadapi berbagai hambatan yang signifikan, sehingga pencapaian hasil yang diharapkan menjadi sulit terwujud dan efektivitas kebijakan publik pun tidak dapat dikatakan berhasil sepenuhnya.

#### 2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Di antara berbagai sumber daya, manusia memegang peranan paling penting karena kualitas dan kompetensinya menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Namun, tanpa dukungan sumber daya finansial dan waktu yang memadai, keberhasilan tetap sulit dicapai. Ketersediaan anggaran yang terbatas dapat menghambat realisasi tujuan kebijakan, sementara keterbatasan

waktu dapat menurunkan kualitas pelaksanaan meskipun tenaga dan dana sudah mencukupi. Dengan demikian, sinergi antara sumber daya manusia, keuangan, dan waktu menjadi kunci utama keberhasilan proses implementasi kebijakan

### 3) Karakteristik Agen Pelaksana.

Fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan publik terletak pada para agen pelaksana yang mencakup organisasi formal maupun informal yang berperan dalam proses implementasi. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sangat bergantung pada kesesuaian karakteristik para pelaksananya. Sebagai contoh, jika kebijakan tersebut menuntut perubahan perilaku masyarakat secara mendasar, maka agen pelaksana perlu memiliki sifat yang tegas, disiplin, dan berkomitmen terhadap penerapan aturan serta sanksi hukum yang berlaku. Di sisi lain, penentuan agen pelaksana juga harus mempertimbangkan luasnya wilayah kebijakan yang akan diterapkan. Semakin besar cakupan implementasi suatu kebijakan, maka semakin banyak pula sumber daya dan pihak pelaksana yang seharusnya dilibatkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.

### 4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sangat ditentukan oleh sikap para pelaksana, apakah mereka menerima atau menolak kebijakan tersebut. Kondisi ini dapat

terjadi karena kebijakan yang diterapkan umumnya bukan merupakan hasil dari perumusan masyarakat lokal yang memahami secara langsung persoalan yang dihadapi, melainkan kebijakan yang berasal dari tingkat atas (top down). Akibatnya, para pengambil keputusan kerap kali tidak memiliki pemahaman mendalam, bahkan tidak menyentuh secara nyata kebutuhan, aspirasi, maupun permasalahan yang ingin diselesaikan oleh masyarakat di lapangan.

5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi berfungsi sebagai elemen kunci sekaligus prasyarat penting dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Apabila koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam proses implementasi berjalan dengan baik, maka kemungkinan terjadinya kesalahan akan semakin kecil, dan sebaliknya, kurangnya koordinasi justru berpotensi menimbulkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Menurut pandangan Van Metter dan Van Horn, aspek terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan publik adalah sejauh mana faktor lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik, yang dapat

berpengaruh langsung terhadap hasil implementasi. Apabila kondisi lingkungan tidak mendukung, hal itu berpotensi menjadi penyebab utama kegagalan pelaksanaan kebijakan. Karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan menuntut perhatian serius terhadap stabilitas dan kesiapan lingkungan eksternal agar proses pelaksanaan dapat berjalan optimal.

- b. Model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III (Dalam Leo Agustino, 2022:154) pendekatan yang diteoreman ada empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Menurut George C. Edward III, faktor pertama yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan adalah aspek komunikasi. Ia menegaskan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan sejauh mana tujuan kebijakan publik dapat tercapai. Pelaksanaan kebijakan akan berjalan efektif apabila para pengambil keputusan memahami secara jelas apa yang harus mereka lakukan. Pemahaman tersebut hanya dapat terwujud apabila proses komunikasi berlangsung dengan baik, sehingga setiap kebijakan maupun aturan pelaksanaannya harus disampaikan kepada pihak yang berwenang atau personel yang tepat. Lebih dari itu, pesan kebijakan yang disampaikan harus memiliki tingkat ketepatan, keakuratan, dan konsistensi yang tinggi. Proses komunikasi atau penyampaian informasi ini diperlukan agar

para pembuat keputusan serta pelaksana kebijakan dapat bertindak selaras dan konsisten dalam menjalankan setiap kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- 1) Transmisi ; transmisi atau proses penyaluran komunikasi yang efektif merupakan kunci terciptanya pelaksanaan kebijakan yang optimal. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi yang menghambat efektivitas implementasi. Kondisi ini umumnya muncul karena pesan kebijakan harus melewati berbagai lapisan birokrasi, sehingga informasi yang disampaikan kerap mengalami perubahan, penyimpangan, atau distorsi dari makna aslinya sebelum mencapai pihak pelaksana di lapangan.
- 2) Kejelasan ; kejelasan informasi dalam proses komunikasi menjadi hal yang sangat penting bagi para pelaksana kebijakan (*street-level bureaucrats*). Pesan kebijakan yang disampaikan harus bersifat tegas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan makna ganda. Meskipun pada kondisi tertentu ketidakjelasan informasi tidak sepenuhnya menghambat proses implementasi, namun dalam praktiknya para pelaksana tetap membutuhkan arahan yang jelas agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan substansi dan tujuan yang telah ditetapkan.

- 3) Konsistensi ; konsisten dalam penyampaian instruksi merupakan aspek penting dalam proses komunikasi kebijakan. Arahan yang disampaikan harus tetap stabil dan tidak berubah-ubah agar mudah dipahami serta dilaksanakan oleh para pelaksana di lapangan. Apabila perintah sering mengalami perubahan, hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan.

Faktor kedua yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah sumber daya. Elemen ini memiliki peran fundamental karena tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Sumber daya mencakup beberapa komponen utama, yaitu:

- 1) Staf, yakni sumber daya manusia (SDM) sebagai unsur paling vital dalam pelaksanaan kebijakan. Banyak kegagalan implementasi terjadi karena jumlah staf yang tidak mencukupi, kurang kompeten, atau tidak memiliki keahlian yang relevan. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada banyaknya jumlah staf, tetapi juga pada kecakapan, kompetensi, dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas sesuai tuntutan kebijakan.
- 2) Informasi, yang terdiri atas dua jenis, yaitu: pertama, informasi mengenai cara pelaksanaan kebijakan agar para pelaksana memahami langkah yang harus dilakukan ketika menjalankan

tugas; kedua, informasi mengenai tingkat kepatuhan pelaksana terhadap aturan dan regulasi pemerintah, karena implementor perlu mengetahui sejauh mana para pihak yang terlibat menaati ketentuan hukum yang berlaku.

- 3) Wewenang, yang pada dasarnya harus bersifat formal agar pelaksana memiliki legitimasi dalam menjalankan kebijakan. Tanpa kewenangan yang sah, implementor akan kehilangan legitimasi di mata publik sehingga menghambat efektivitas implementasi. Namun demikian, keberadaan wewenang formal tidak selalu menjamin keberhasilan, karena kewenangan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang justru menurunkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
- 4) Fasilitas, yaitu sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Meskipun pelaksana memiliki jumlah staf yang cukup, memahami tugasnya, dan memiliki kewenangan formal, tanpa dukungan fasilitas fisik yang memadai, proses implementasi kebijakan akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III adalah disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan. Disposisi dianggap sebagai unsur krusial karena efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pemahaman para implementor terhadap apa yang harus dilakukan, tetapi juga oleh

kemauan dan komitmen mereka dalam menjalankan kebijakan tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktiknya. George C. Edward III menyoroti beberapa aspek penting dalam variabel disposisi, yaitu:

- 1) Efek Disposisi, yang menunjukkan bahwa sikap negatif atau ketidaksesuaian perilaku pelaksana dapat menjadi hambatan nyata dalam implementasi. Oleh sebab itu, pemilihan individu yang akan menjalankan kebijakan harus mempertimbangkan dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan serta kepentingan masyarakat luas.
- 2) Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*), di mana Edward III menekankan pentingnya penataan struktur birokrasi melalui rekrutmen dan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, keahlian, serta kapabilitas yang sesuai. Pengaturan birokrasi ini juga mencakup pembentukan sistem pelayanan publik yang efektif, evaluasi kinerja pegawai, hingga mekanisme bypassing apabila diperlukan.
- 3) Insentif, yaitu pemberian dorongan berupa imbalan atau keuntungan tertentu untuk memengaruhi perilaku pelaksana agar selaras dengan tujuan kebijakan. Menurut Edward III, insentif dapat menjadi alat strategis bagi pembuat kebijakan untuk mengarahkan tindakan implementor, karena pada dasarnya individu cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau organisasional. Dengan demikian, manipulasi insentif yang

tepat dapat memperkuat motivasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara optimal.

Faktor keempat yang turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber daya telah tersedia, para pelaksana memahami tugas yang harus dilakukan, serta memiliki kemauan untuk menjalankannya, kebijakan tetap berpotensi gagal apabila terdapat kelemahan dalam sistem birokrasi. Kompleksitas kebijakan publik sering kali menuntut keterlibatan banyak pihak, sehingga apabila struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan yang ada, efektivitas sumber daya akan menurun dan motivasi pelaksana ikut melemah, yang pada akhirnya menghambat proses implementasi. Sebagai pelaksana utama kebijakan, birokrasi harus mampu memberikan dukungan terhadap keputusan politik melalui koordinasi yang terarah dan efisien.

George C. Edward III menegaskan bahwa terdapat dua karakteristik penting yang dapat meningkatkan efektivitas struktur birokrasi, yaitu:

- 1) Penyusunan Standar Operating Procedures (SOP) yang bersifat fleksibel. SOP diartikan sebagai seperangkat pedoman atau langkah-langkah kerja yang disusun secara sistematis untuk membantu pegawai, aparatur, atau birokrat dalam melaksanakan aktivitas rutin harian mereka (*days-to-days politics*) berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya, baik itu standar baku

maupun standar minimum yang diharapkan oleh masyarakat. Fleksibilitas dalam SOP memungkinkan pelaksana kebijakan menyesuaikan tindakan dengan situasi di lapangan tanpa keluar dari prinsip dasar yang telah ditetapkan.

- 2) penerapan fragmentasi, yaitu pembagian tanggung jawab dan kegiatan ke dalam unit-unit kerja yang relevan dengan bidangnya masing-masing. Dengan adanya pembagian peran yang jelas dan pelaksanaan yang sesuai kapasitas organisasi, proses implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
- c. Model Implementasi Kebijakan menurut Merliee S. Grindle (Dalam Leo Agustino, 2022:159), Pendekatan ini dikenal dengan istilah *Implementation as a Political and Administrative Process*. Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dinilai melalui sejauh mana hasil (*outcomes*) yang diharapkan tercapai. Penilaian tersebut dapat ditinjau dari dua aspek utama diantaranya:
- 1) Dari sisi proses, yaitu dengan menelaah apakah pelaksanaan kebijakan telah berjalan sesuai dengan rancangan atau desain kebijakan yang telah ditetapkan.
  - 2) dari sisi pencapaian tujuan kebijakan, yang diukur melalui dua indikator penting:
    - a) Dampak atau pengaruh kebijakan terhadap masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

- b) Tingkat perubahan yang terjadi serta sejauh mana kelompok sasaran menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut.

Grindle (1980:5) menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik sangat bergantung pada tingkat *implementability*-nya, yang mencakup dua aspek utama, yaitu *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

1) *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

- a) Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

*Interest affected* merujuk pada beragam kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap proses pelaksanaan suatu kebijakan. Indikator ini menegaskan bahwa dalam setiap implementasi kebijakan selalu terdapat berbagai pihak dengan kepentingan masing-masing, dan yang menjadi fokus utama adalah sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut memengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan.

- b) *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada aspek ini, *content of policy* menekankan bahwa setiap kebijakan perlu memuat berbagai bentuk manfaat yang mencerminkan hasil positif dari proses pelaksanaannya. Dengan kata lain, kebijakan yang dirumuskan seharusnya mampu menghasilkan dampak yang

menguntungkan sebagai bukti keberhasilan implementasinya.

- c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan memiliki sasaran tertentu yang ingin diwujudkan. Dalam konteks *content of policy*, penekanannya terletak pada sejauh mana perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut harus ditetapkan secara terukur dan memiliki skala pencapaian yang jelas.

- d) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Proses pengambilan keputusan memiliki peran krusial dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, pada bagian ini perlu dijelaskan secara jelas di mana posisi atau tingkat pengambilan keputusan berada dalam kebijakan yang akan diterapkan.

- e) *Program Implementor* (pelaksana program)

Pelaksanaan suatu kebijakan atau program memerlukan dukungan dari para pelaksana yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten perlu dijelaskan dan didokumentasikan secara jelas pada bagian ini.

- f) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Agar suatu kebijakan dapat terlaksana secara efektif, diperlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang memadai sehingga proses implementasinya dapat berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.

2) *Context of Policy menurut Grindle* adalah:

- a) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penting untuk mempertimbangkan faktor kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat agar implementasinya dapat berjalan lancar. Apabila aspek-aspek tersebut diabaikan atau tidak dianalisis secara mendalam, maka besar kemungkinan kebijakan yang direncanakan tidak akan tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

- b) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Konteks lingkungan tempat suatu kebijakan dijalankan memiliki pengaruh besar terhadap tingkat keberhasilannya. Oleh karena itu, bagian ini bertujuan untuk

menguraikan karakteristik lembaga yang terlibat, karena sifat serta dinamika lembaga tersebut dapat memengaruhi proses dan hasil dari pelaksanaan kebijakan.

- c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Aspek lain yang dianggap penting dalam proses implementasi kebijakan adalah tingkat kepatuhan serta respons para pelaksana. Oleh karena itu, bagian ini dimaksudkan untuk menjelaskan sejauh mana pelaksana menunjukkan ketaatan dan tanggapan mereka terhadap kebijakan yang diterapkan.

Dari keempat model implementasi kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memilih menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III (Dalam Leo Agustino, 2022:154). Alasan pemilihan model ini adalah karena model George C. Edward III dianggap lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam konteks penelitian. Selain itu, model ini memiliki kesesuaian yang erat dengan permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian, khususnya terkait indikator-indikator yang memengaruhi proses implementasi kebijakan publik. Keterkaitan tersebut terlihat jelas dalam penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana variabel-variabel dalam model George C. Edward III, seperti

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, relevan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Leo Agustino, (2022:171-177) ada beberapa hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan *public* diantaranya sebagai berikut:

### a. Respek Anggota Masyarakat Pada Otoritas dan Keputusan Pemerintah

Menurut pandangan filsafat politik John Locke, kodrat manusia memiliki *state of nature* yang bersifat positif, yang berarti manusia pada dasarnya mampu menjalin hubungan sosial yang harmonis antarindividu. Ketika relasi sosial ini berjalan dengan baik, masyarakat akan menunjukkan sikap saling menghormati, menghargai orang tua sebagai otoritas moral, menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang tinggi, serta menaati hukum dan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Kepatuhan semacam ini akan bertahan selama masyarakat masih meyakini bahwa ketaatan terhadap hukum dan aturan tersebut memiliki dasar moral yang benar dan rasional. Dengan demikian, kesadaran moral manusia menjadi fondasi bagi penghormatan terhadap hukum dan legitimasi pemerintah. Faktor inilah yang menentukan sejauh mana kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif. Ketika masyarakat memandang pemerintah sebagai otoritas yang sah dan berlegitimasi,

maka secara alamiah mereka akan mendukung serta mematuhi kebijakan yang diterapkan pemerintah.

b. Kesadaran Untuk Menerima Kebijakan

Dalam masyarakat yang berorientasi pada logika *rational choice*, terdapat sebagian individu maupun kelompok yang menerima serta menjalankan kebijakan publik karena dianggap rasional, masuk akal, dan memiliki urgensi tertentu. Namun, tidak sedikit pula yang enggan melaksanakan kewajiban seperti membayar pajak, terutama ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Meski demikian, apabila mereka meyakini bahwa pembayaran pajak berperan penting dalam memperbaiki kondisi ekonomi nasional, kesadaran untuk memenuhi kewajiban tersebut akan muncul secara sukarela. Hanya saja, membangkitkan kesadaran semacam itu bukanlah hal yang mudah, sebab pemerintah harus berupaya keras mengubah pola pikir masyarakat agar mereka memahami nilai rasional di balik kebijakan tersebut.

c. Ada atau Tidaknya Sanksi Hukum

Salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah keberadaan sanksi hukum. Individu cenderung mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan, meskipun terkadang dilakukan dengan rasa terpaksa, karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi hukum seperti denda, hukuman kurungan, atau bentuk sanksi lainnya yang tercantum dalam kebijakan tersebut. Atas dasar itu, pembuat kebijakan biasanya menyertakan sanksi

hukum sebagai strategi untuk memastikan agar masyarakat atau pihak terkait mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Selain karena takut terhadap hukuman, kepatuhan juga sering muncul dari keinginan untuk tidak dicap sebagai pelanggar hukum, sehingga individu memilih untuk menaati arahan kebijakan meskipun tanpa sepenuhnya didasari oleh kesadaran pribadi.

d. Kepentingan Pribadi atau Kelompok

Baik individu maupun kelompok sebagai subjek kebijakan kerap merasakan manfaat langsung dari pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh sebab itu, tingkat efektivitas implementasi kebijakan sangat berpengaruh pada sejauh mana penerimaan dan dukungan yang diberikan oleh para subjek kebijakan terhadap kebijakan tersebut.

e. Bertentangan Dengan Sistem Nilai yang Ada

Pelaksanaan kebijakan dapat kehilangan efektivitasnya ketika bertentangan dengan sistem nilai dan norma yang hidup di suatu masyarakat. Misalnya, pada awal tahun 2000-an, pemerintah berupaya menghidupkan kembali kebijakan pengumpulan dana untuk pengelolaan olahraga melalui praktik perjudian yang sebelumnya dikenal sebagai Subsidi Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Namun, kebijakan tersebut gagal karena mendapat penolakan keras dari masyarakat, dan jika tetap dijalankan, pemerintah kemungkinan besar akan menghadapi berbagai hambatan hingga kebijakan itu akhirnya dibatalkan. Contoh lainnya

terjadi pada tahun 2014, ketika masyarakat menentang rancangan undang-undang kebudayaan yang memuat pasal terkait tembakau. Warga menilai bahwa tembakau dan kegiatan merokok tidak mencerminkan budaya Indonesia, sehingga pemerintah akhirnya memutuskan untuk menarik kembali RUU tersebut.

f. Keanggotaan Seseorang atau Sekelompok Orang dalam Suatu Organisasi

Tingkat kepatuhan seseorang atau kelompok terhadap suatu kebijakan sering kali dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam organisasi tertentu. Apabila individu atau kelompok tersebut menjadi bagian dari organisasi yang mendukung kebijakan pemerintah, maka mereka cenderung mengikuti dan melaksanakan arah kebijakan tersebut secara sadar. Namun, jika organisasi tempat mereka bergabung memiliki tujuan yang bertentangan dengan ide atau gagasan kebijakan pemerintah, maka sebaik apa pun argumentasi yang disusun untuk kepentingan publik, kebijakan itu tetap sulit diterima oleh mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak selalu dapat tercapai secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

g. Wujudnya Kepatuhan Selektif

Tidak dapat disangkal bahwa tidak semua individu atau kelompok sebagai subjek kebijakan menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang diberlakukan pemerintah. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat mungkin menaati satu kebijakan namun

mengabaikan kebijakan lainnya. Sebagai contoh, seorang pedagang kaki lima bisa sangat disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatannya saat berkendara, tetapi di sisi lain ia melanggar larangan berdagang di area yang ditetapkan sebagai zona bebas PKL karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena ini menggambarkan adanya bentuk kepatuhan selektif, yakni kondisi di mana ketaatan seseorang bergantung pada kepentingan yang dirasakannya. Pola kepatuhan seperti inilah yang turut memengaruhi sejauh mana implementasi kebijakan dapat berjalan efektif atau tidak.

h. Waktu

Tingkat efektivitas suatu implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh faktor waktu. Misalnya, ketika masyarakat menilai sebuah kebijakan tidak sejalan dengan kepentingan mereka, penolakan terhadap kebijakan tersebut cenderung muncul. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan yang pada awalnya ditentang atau bahkan dianggap kontroversial dapat mengalami perubahan persepsi di kalangan masyarakat, hingga akhirnya diterima sebagai sesuatu yang wajar dan layak dijalankan.

i. Sosialisasi

Aspek lain yang memengaruhi penilaian efektivitas implementasi kebijakan adalah terselenggaranya sosialisasi. Sosialisasi berperan sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai rencana dan langkah yang akan diambil pemerintah melalui

kebijakan yang telah dirancang. Apabila sosialisasi tidak dilakukan dengan memadai, kemungkinan besar tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

j. Koordinasi Antar-Lembaga atau Antar-Organisasi

Pelaksanaan kebijakan sering kali melibatkan berbagai pengambil keputusan dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, koordinasi menjadi faktor kunci dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan. Tidak jarang suatu kebijakan dinilai baik dari segi substansi, tetapi lemah dalam pelaksanaannya. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya koordinasi antar lembaga atau organisasi yang seharusnya melaksanakan maupun mengawasi kebijakan tersebut. Padahal, apabila koordinasi dijalankan dengan baik, penyelesaian masalah publik bisa terjadi lebih cepat dan efektif.

## 8. Pengertian Kearsipan

Kata *arsip* dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda *archieff*, yang etimologinya bersumber dari bahasa Yunani *archium*, yang berarti peti atau wadah untuk menyimpan sesuatu. Awalnya, istilah arsip merujuk pada tempat atau ruang penyimpanan dokumen, namun kini lebih mengacu pada catatan atau surat yang memiliki nilai guna dan perlu disimpan melalui sistem kearsipan. Sementara itu, dalam bahasa Latin, arsip dikenal dengan istilah *felum* (bundle) yang berarti benang atau tali, karena pada masa itu benang digunakan untuk mengikat

kumpulan lembaran tulisan agar lebih ringkas dan mudah diakses saat dibutuhkan. (Suwarni et al., 2024:5)

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip didefinisikan sebagai rekaman dari kegiatan atau peristiwa yang tersaji dalam berbagai bentuk dan media sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang dibuat maupun diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, institusi pendidikan, perusahaan, organisasi politik, lembaga kemasyarakatan, maupun perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, kearsipan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan arsip.

Menurut Roeliana & Yogopriyatno, (2023:8) Asip merupakan catatan dari berbagai kegiatan atau peristiwa yang tersaji dalam beragam bentuk dan media, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang dibuat maupun diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, institusi pendidikan, perusahaan, organisasi politik, lembaga kemasyarakatan, maupun individu dalam rangka menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **9. Jenis-Jenis Arsip**

Menurut Suwarni et al., (2024:7) Ada bermacam-macam jenis arsip antara lain yaitu sebagai berikut :

a. Jenis Arsip berdasarkan sifatnya

- 1) Arsip tidak penting, adalah arsip yang hanya memiliki nilai informasi sementara. Contohnya meliputi surat undangan dan surat pemberitahuan.
  - 2) Arsip biasa, adalah arsip yang awalnya memiliki nilai penting tetapi kehilangan kegunaannya setelah informasi di dalamnya usang. Contohnya surat lamaran kerja dan surat tagihan.
  - 3) Arsip penting, adalah arsip yang berhubungan dengan masa lalu maupun masa depan, sehingga perlu disimpan dalam jangka waktu lama. Contohnya surat perjanjian dan kontrak.
  - 4) Arsip sangat penting (vital), adalah arsip yang berfungsi sebagai alat pengingat permanen dan memiliki nilai sejarah atau ilmiah. Contohnya naskah proklamasi dan surat keputusan hasil penelitian ilmiah.
  - 5) Arsip rahasia, adalah arsip yang hanya boleh diakses oleh pihak tertentu dalam suatu organisasi. Contohnya hasil penilaian pegawai dan strategi pemasaran.
- b. Jenis arsip berdasarkan fungsinya
- 1) Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan atau pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun dalam kegiatan administrasi pemerintah atau perusahaan. Arsip dinamis dibagi menjadi:
    - a) Arsip aktif, yaitu arsip yang terus-menerus digunakan dalam kegiatan kantor dan sering dikeluarkan untuk berbagai keperluan.

- b) Arsip inaktif, yaitu arsip dinamis yang penggunaannya sudah jarang dilakukan, biasanya hanya berfungsi sebagai referensi atau sumber informasi.
  - 2) Arsip statis adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam perencanaan atau pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun dalam kegiatan administrasi pemerintah, sehingga sifatnya lebih bersifat permanen dan penyimpanannya difokuskan pada nilai sejarah atau hukum.
  - c) Jenis Arsip berdasarkan keasliannya
- Penggolongan arsip berdasarkan pada tingkat keasliannya, bisa dibedakan menjadi 3, yaitu:
- 1) Arsip asli adalah dokumen yang memuat tanda tangan, cap resmi, cetakan printer, atau hasil ketikan langsung, yang berfungsi sebagai dokumen utama dan memiliki kekuatan legal yang sah.
  - 2) Arsip salinan adalah dokumen yang dibuat secara terpisah dari dokumen asli, namun tetap memiliki kesamaan atau kesesuaian dengan dokumen aslinya.
  - 3) Arsip tembusan merupakan dokumen kedua, ketiga, atau seterusnya yang dibuat bersamaan dengan dokumen asli, tetapi ditujukan kepada pihak lain selain penerima dokumen asli.

## **10. Konsep Aplikasi SRIKANDI**

SRIKANDI adalah sebuah sistem informasi elektronik yang dirancang untuk membangun tata kelola pemerintahan yang terintegrasi

dan modern, baik di tingkat lembaga negara maupun pemerintah daerah. Melalui aplikasi ini, seluruh aktivitas kearsipan, termasuk pengelolaan dokumen dan surat-menyurat, dapat terdokumentasi secara digital sehingga menciptakan jejak arsip yang utuh, aman, dan mudah diakses kembali. Keberadaan SRIKANDI tidak hanya memperkuat pengelolaan arsip sebagai memori kolektif bangsa, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menekankan pada transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dengan integrasi tersebut, SRIKANDI berfungsi sebagai instrumen strategis yang mendorong transformasi digital birokrasi, mempercepat layanan administrasi publik, serta memastikan setiap informasi arsip tersimpan dengan baik sebagai rujukan jangka panjang dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan (Pratiwi & Dwimawanti, 2024:3).

Menurut Hikmah et al., (2024:124) SRIKANDI merupakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang dibangun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai langkah strategis dalam modernisasi pengelolaan arsip negara. Kehadiran aplikasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga pemerintah dengan peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berperan dalam aspek koordinasi dan penyusunan regulasi, sehingga aplikasi ini memiliki dasar hukum dan arah kebijakan yang jelas. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan

Informatika (KOMINFO) bertugas mengembangkan sistem aplikasi sekaligus menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang andal. Untuk menjamin keamanan data dan transaksi digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berfungsi sebagai pengawal keamanan aplikasi, termasuk sertifikasi elektronik yang memastikan keabsahan dokumen digital. Sementara itu, ANRI tetap menjadi aktor utama yang merancang proses bisnis kearsipan serta menyusun data dan informasi dalam pengelolaan arsip dinamis agar sesuai dengan standar nasional. Sinergi antarinstansi tersebut menjadikan SRIKANDI bukan hanya sebuah aplikasi teknis, melainkan juga wujud nyata dari integrasi pemerintahan digital yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi negara.

SRIKANDI bertujuan menciptakan kelancaran dalam persyaratan dan kearsipan secara elektronik yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online secara integrasi serta terekam pada pusat data nasional. Dengan adanya aplikasi SRIKANDI ini mampu meningkatkan pemahaman kapasitas dan keterampilan Aparatur Sipil Negara pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui kearsipan berbasis digital dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi akuntabilitas dan memori kolektif bangsa dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (Hikmah et al., 2024:124)

Implementasi aplikasi SRIKANDI di seluruh pemerintah daerah menjadi salah satu langkah nyata dalam mewujudkan birokrasi yang modern, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Mulai dioperasikan secara nasional pada tahun 2021, SRIKANDI hadir sebagai solusi strategis untuk pengelolaan arsip dinamis berbasis elektronik yang mampu mengintegrasikan tata kelola arsip antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Karanganyar, sehingga menciptakan sistem administrasi yang lebih terhubung, responsif, dan mendukung visi transformasi digital pemerintahan di Indonesia (Devega & Yuhelmi, 2023:2)

Menurut Devega & Yuhelmi, (2023:121) SRIKANDI merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan untuk mendukung instansi pemerintah dan organisasi dalam mengelola surat serta dokumen secara sistematis, efisien, dan terintegrasi. Aplikasi ini dirancang sebagai solusi atas permasalahan pengelolaan administrasi dan kearsipan konvensional yang cenderung tidak efektif, lamban, dan rentan terhadap kesalahan. Melalui SRIKANDI, seluruh proses pengelolaan surat tidak hanya berfokus pada penyimpanan arsip, tetapi mencakup rangkaian kegiatan administrasi secara menyeluruh, mulai dari penerimaan surat masuk, pengolahan dan pengiriman surat keluar, pengarsipan elektronik, hingga pemantauan pergerakan surat secara real-time.

Penerapan mekanisme terintegrasi dalam SRIKANDI memungkinkan terciptanya alur kerja administrasi yang lebih cepat,

tertib, dan terdokumentasi dengan baik. Setiap proses pencatatan dilakukan secara digital sehingga dapat meningkatkan akurasi data, memudahkan penelusuran arsip, serta mengurangi risiko kehilangan, duplikasi, maupun kesalahan dokumen. Selain itu, sistem ini memberikan kemudahan bagi pegawai dalam mengakses informasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga mendukung prinsip keamanan dan pengendalian arsip.

Lebih lanjut, SRIKANDI berperan strategis dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan transformasi digital birokrasi. Melalui pemanfaatan aplikasi ini, instansi pemerintah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja organisasi. Dengan demikian, SRIKANDI tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

### C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1

#### Kerangka Pemikiran

